

POLICY BRIEF

GANASNYA VIRUS RADIKALISME DIGITAL PADA GENERASI MILLENIAL DI MASA PANDEMI

EXECUTIVE SUMMARY

Generasi Millineal tidak terlepas dengan kehidupan di dunia maya. Dunia maya merupakan sebuah ruang digital yang bebas dan sangat rentan dengan tindakan kejahatan siber, termasuk infiltrasi paham intoleransi yang menjadi bibit radikalisme dan terorisme. Kelompok terorisme aktif melakukan kampanye dan perekrutan serta penggalangan dana di dunia daring sejak lama. Serangan Pandemi COVID 19 memaksa semua orang harus beradaptasi dan membuat kegiatan ekonomi global dan nasional melambat. Situasi krisis pandemi justru tidak membuat kelompok radikal terorisme melemah namun justru memanfaatkannya untuk memperkuat jaringan melalui dunia digital dan menyasar kelompok muda Millenial. Untuk itu dibutuhkan kerjasama semua pihak untuk memaksimalkan literasi digital baik melalui sekolah maupun masyarakat untuk meminimalkan penyalahgunaan teknologi informasi untuk kejahatan siber. Selain itu, pendidikan kebangsaan, kebangsaan dan toleransi disesuaikan dengan tipikal anak remaja saat ini. Terakhir, perlu untuk mengevaluasi program de-radikalisasi dengan lebih melibatkan komunitas.

MASALAH/ISU YANG AKAN DIBAHAS

Serangan bom Gereja Katedral Kota Makassar pada tanggal 28 Maret 2021 melibatkan pasangan suami istri generasi Millennial. Tidak lama berselang, seorang perempuan yang juga berusia Millennial menyerang Markas Besar Polisi Republik Indonesia pada 31 Maret 2021. Dua kejadian tindakan terorisme yang terjadi selama masa pandemi ini membunyikan lonceng peringatan maraknya virus radikalisme menerpa kalangan Millennial.

Radikalisme dan terorisme merupakan ancaman nyata bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi generasi muda. Ancaman ini bukan hanya berkembang di dunia nyata tetapi juga di dunia maya. Saat ini, media sosial ditenggarai telah menjadi sarana bagi menyebarnya paham radikal dan intoleran yang menjadikan generasi muda sebagai aktor sekaligus targetnya. Internet memungkinkan kelompok-kelompok ekstremis untuk menyesuaikan pesan mereka dengan target audiens tertentu, sebuah strategi yang disebut "narrowcasting" dengan menyasar kelompok lebih spesifik, misalnya generasi muda yang sedang dalam proses transisi (Torok, 2011).

Kebijakan Pemerintah dalam melawan radikalisasi antara lain dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Pemasarakatan. Dalam PP tersebut diatur langkah-langkah mencegah terorisme dan deradikalisasi yang dimotori oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Sayangnya program de-radikalisasi BNPT pada napiter terorisme tidak berjalan sukses. Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) (2020) yang mengindikasikan lemahnya program de-radikalisasi yang dilakukan pemerintah dimana 11 persen dari para mantan napiter kembali menjadi pelaku terorisme. Bahkan IPAC mengklaim menguatnya jaringan terorisme selama penyebaran COVID 19. Hal yang sama juga dilaporkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bahwa kondisi pandemic juga menyuburkan kejahatan siber sampai empat kali lipat dari sebelumnya (Kompas.com, 2020).

Bisa dikatakan bahwa serangan pandemi yang melumpuhkan hampir semua sektor sosial dan ekonomi juga melemahkan pengawasan pemerintah. Kondisi krisis ini dimanfaatkan kelompok intoleran pro terorisme dengan menguatkan kembali jaringannya dengan menjangkau lebih luas melalui internet dan mempengaruhi anak muda pada paham intoleransi dan radikalisme melalui sosial media. Untuk itu dibutuhkan perhatian Pemerintah bersama stakeholder lain untuk bekerjasama meredam radikalisasi Millennial di dunia maya agar mampu menghentikan gerakan terorisme di tanah air.

Media sosial menjadi inkubator penyebaran radikalisme. "Masalah radikalisme, media sosial disinyalir telah menjadi inkubator radikalisme, khususnya bagi generasi muda," kata Deputi VII Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto. Wawan juga melaporkan bahwa 85 persen generasi Millennial rentan terpapar radikalisme berdasarkan hasil survei Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
(Kompas.com, 15 Juni 2021)

APA YANG MENYEBABKAN TERJADINYA MASALAH/ISU TERSEBUT?

Digitalisasi radikal Millennial disebabkan oleh empat faktor utama sebagai berikut:

1. Belajar dari rumah rentan tersusupi kelas radikal online

Serangan pandemi COVID-19 ke Indonesia sejak Maret 2020 memaksa semua kegiatan sekolah dilakukan hanya di rumah saja. Proses pengajaran di semua level pendidikan dilakukan secara daring. Tidak hanya kegiatan pendidikan berpindah ke aktivitas virtual, namun kegiatan bisnis dan pelayanan publik juga secara perlahan berpindah ke dunia maya. Kondisi ini membuat semua orang menjadi lebih terbiasa dalam kehidupan dunia maya. Sementara dunia maya merupakan sebuah ruang terbuka dan rentan dengan berbagai kejahatan siber dan rentan disusupi paham intoleransi dan terorisme.

Situasi aktivitas yang serba virtual melemahkan pengawasan orang tua dan keluarga terhadap kegiatan dunia maya. Kelompok terorisme kemudian memanfaatkan kondisi ini dengan membuka kelas radikalisasi online dan menyasar Millennial dan remaja dengan menggunakan aplikasi Zoom.

"... Sekarang didoktrin melalui pengajaran dan itu jarak jauh, itu tentunya selangkah lebih maju. Jadi, perlu diwaspadai munculnya generasi kelompok radikal yang hasil dari didikan doktrinasi jarak jauh melalui kelas online itu".
(Media Indonesia, 2020).

2. Melemahnya ekonomi selama pandemi dimanfaatkan kelompok radikal

Pandemi COVID 19 memaksa kegiatan ekonomi global dan nasional melambat. Pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi membuat hampir semua usaha harus menutup kegiatan bisnisnya yang berujung pada pengetatan anggaran perusahaan dan pengurangan jumlah karyawan. Hasilnya, BPS melaporkan meningkatnya angka pengangguran di Indonesia dan mencapai 2,56 juta penduduk dari 29,12 juta penduduk usia kerja yang merupakan imbas dari Pandemi Covid-19 (Tempo, 2021). Memburuknya kondisi ekonomi dimanfaatkan oleh kelompok intoleransi dan terorisme untuk mendekati keluarga muda dan anak muda yang terpaksa menganggur karena pandemic. The Habibie Center (2021) mengindikasikan kelompok pendukung terorisme aktif membuka pusat bantuan kemanusiaan, pendidikan alternative dan murah untuk masyarakat serta menyediakan pekerjaan alternative bagi mereka yang kehilangan pekerjaan karena dampak pandemi.

"Kelompok ISIS Akhwat secara jelas menyatakan bahwa mereka akan mempekerjakan anggota-anggota ISIS dan simpatisan yang dipecat dari pekerjaannya akibat COVID-19. Tak hanya itu, mereka juga menerima orang-orang yang dipecat dari pekerjaannya meskipun di luar kelompok ISIS"
(the Habibie Center, 2021, hlm. 19)

3. Implikasi Kebijakan Pembatasan Sosial pada Penutupan Rumah Ibadah

Kebijakan pembatasan sosial juga berdampak pada pelarangan aktivitas kegiatan keagamaan. Kondisi ini memancing kelompok intoleran untuk melawan kebijakan pembatasan kegiatan keagamaan pemerintah dan menggunakan sebagai agenda radikalisasi. Laporan IPAC (2020) dan the Habibie Center (2021) melaporkan bahwa kelompok intoleran menggunakan Pandemi COVID-19 sebagai bencana terhadap pemerintah dan negara-negara yang selama ini dianggap menyerang dan melemahkan kelompok Islam di negara lain. Dengan demikian kelompok intoleran dan terorisme dengan mudah mendapatkan dukungan dari kelompok yang menganggap pelarangan kegiatan di rumah ibadah adalah berlebihan dan tidak adil. Dengan demikian, kelompok ekstrim yang rentan radikalisme menggunakan media sosial untuk menyerang kebijakan pemerintah tersebut yang bertujuan untuk mengurangi kepercayaan masyarakat pada pemerintah.

"Momentum pandemi COVID-19 dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok ekstremisme berkekerasan untuk memperkuat konsolidasi internal, di antaranya melalui penguatan narasi dan strategi rekrutmen. ...Kelompok-kelompok yang terafiliasi dengan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) menggunakan media sosial untuk menyebarluaskan teori-teori konspirasi tentang asal-usul COVID-19 dengan tujuan melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah sembari memperkuat legitimasi ideologi ekstremisme berkekerasannya."
(the Habibie Center, 2021, hlm. 3)

4. Lemahnya Literasi Digital

Kerentanan masyarakat, khususnya pemuda, terhadap radikalisme digital tidak terlepas dengan rendahnya literasi digital masyarakat Indonesia. Hal ini didukung oleh data studi literasi digital Indonesia (Kata Data, 2020) yang menunjukkan rendahnya kemampuan pemikiran kritis pengguna internet Indonesia sehingga 30% - 60% responden mengakui pernah terpapar hoaks, khususnya pengguna internet berusia muda. Data yang sama juga melaporkan bahwa terdapat 11% responden menyebarkan hoaks karena tidak merasa penting mempertimbangkan kebenaran informasi yang diterima. Data ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia kurang memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi hoaks, serta rentan untuk ikut menyebarkan informasi hoaks

AGENDA KEBIJAKAN APA YANG HARUS DILAKUKAN

Pandemi COVID-19 merubah kebiasaan dan sosial budaya masyarakat dengan mentransformasi hampir sebagian aktivitas sosial ekonomi dilakukan secara digital. Aktifnya aktivitas kelompok usia Millennial di dunia digital yang bebas dan sangat rentan dengan berbagai kejahatan siber memposisikan mereka menjadi sasaran propaganda paham intoleransi radikal dari kelompok jaringan terorisme. Selain itu, pandemi memperparah sistem ekonomi dan membatasi kegiatan ibadah melahirkan antipasti masyarakat pada lambannya pemerintah kemudian dimanfaatkan oleh kelompok intoleran radikal jaringan terorisme untuk memperkuat jaringan mereka melalui jaringan internet.

Untuk menghentikan ganasnya serangan radikalisasi Millennial di dunia digital di masa pandemi, kami mengusulkan tiga rekomendasi kebijakan berikut:

- 1 Untuk mengurai paparan radikalisme digital pada anak muda maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan dapat lebih memaksimalkan literasi digital melalui Mata Pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan fokus pada pemahaman validasi kebenaran sumber informasi dan keamanan identitas daring mereka. Literasi digital tidak semata pada siswa tapi juga kepada guru dan orang tua. Untuk itu merekomendasi Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mendorong pelibatan orang tua dalam mengawasi anaknya dalam beraktivitas di dunia digital. Dan juga menjadikan literasi digital juga menjadi komponen utama dalam pendidikan dan pelatihan guru.
- 2 Merekomendasikan peningkatan kegiatan, kampanye dan dialog tentang pendidikan kebangsaan, toleransi dan multikulturalisme di sekolah, khususnya sekolah-sekolah yang memiliki murid yang homogen dalam hal agama dan suku kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Dinas Pemuda di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota. Metode kegiatan diharapkan meminimalkan pendekatan militeristik, seperti baris berbaris dan latihan fisik, yang tidak sesuai dengan pendekatan generasi Millennial. Kegiatan didesain dengan berbasis digital dan sesuai dengan minat generasi muda saat ini dengan melibatkan semua kelompok muda kreatif.
- 3 Terakhir, untuk mengurai pengaruh radikalisasi intoleran jaringan terorisme, sebaiknya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengevaluasi program de-radikalisasi dengan lebih melibatkan komunitas dimana narapidana terorisme tinggal bersama keluarganya. Pemerintah mendukung peningkatan kapasitas organisasi komunitas dalam mendukung upaya transformasi napiter kembali ke masyarakat melalui pendekatan berbasis ekonomi yang berkelanjutan dan berbasis kolaborasi

Daftar Pustaka

- Institute for Policy Analysis of Conflict (2020) COVID 19 and The Mujahidin of Eastern Indonesia (MIT). IPAC Short Briefing No.3
- Kata Data Insight Center (2020) Status Literasi Digital Indonesia. Hasil Survei di 34 Provinsi. Jakarta: Kata Data dan Kementrian Kominukasi dan Informatika.
- Kompas.com. (2021) BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme, <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/15/19134501/bin-85-persen-generasi-milenial-rentan-terpapar-radikalisme>.
- Kompas.com. (2020) Kejahatan Siber di Indonesia Naik 4 kali Lipat Selama Pandemi, <https://tekno.kompas.com/read/2020/10/12/07020007/kejahatan-siber-di-indonesia-naik-4-kali-lipat-selama-pandemi>.
- Media Indonesia (2020) Waspadai Kelas-Kelas Online Radikalisme, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/323822/waspada-kelas-kelas-online-radikalisme>.
- The Habibie Center (2021) Pandemi, Demokrasi dan Ekstremisme Berkekerasan di Indonesia. Jakarta: the Habibir Center
- Torok, Robyn. (2011). Facebook Jihad: A Case Study of Recruitment Discourses and Strategies Targeting a Western Female. Proceeding of the 2nd International Cyber Resilience Conference, hlm. 84-93. Perth: Edit Cowan University

Penulis Andi Ahmad Yani

Peneliti Center for Peace, Conflict and Democracy (CPCD) Universitas Hasanuddin dan dosen Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.